

## **KONDISI KEMISKINAN DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### ***POVERTY CONDITION IN RURAL AND URBAN REGIONS***

**Ikawati dan Sri Wahyuni**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).  
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telpn 0274-377265. HP. 087839561959.  
Email: ikawati.susatyo@yahoo.com.

Naskah diterima 10 Juni 2016, direvisi 13 Juli 2016, disetujui 5 Agustus 2016

#### **Abstract**

*The research was done to know the condition of poor families in rural and urban areas. The research was descriptive used qualitative approach. Research location was determined through a community setting with administration category, taking setting rural and urban areas. Research target and object were registered and unregistered poor families by the government social services. Based on the condition, were chosen 600 poor families in rural area and 600 poor families in urban area. Research object was poor families both in rural and urban areas. Data were gathered through questionnaires distribution and observation. Research data analysed manually and electronically help by excel and statistical program version 17.00 for window. Qualitative data analysed through descriptive technique and interpreted. The research found that there was a difference and similarity of poverty condition in rural and urban areas. The similarity were having family members 3-4 average, eating frequency two times daily, no side job, no skill, they work in informal sector, participate in environment activity, spend the money for basic needs, lack of saving habit, having no many chance in decision making in many occasions, access to social service was limited, having limited access. The difference were education background mostly primary school, permanent and non-permanent job in agriculture, having their own house, room specification as its each function, using wood as the energy (rural); while urban more vary, educational background primary, secondary, and high school, non-permanent and permanent labors non-agriculture, use main energy electric and gas, social participation was more higher in rural than in urban area. Based on the research recommended that the Ministry of Social Affairs, through General Directorate of Rural and Urban Poverty Prevention, need a just poverty indicators and instrument to identify poor family so that there will be a right target in programs that will be applied.*

**Keywords: Poverty, Rural, Urban Area.**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi keluarga miskin di pedesaan dan perkotaan. Jenis penelitian adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara community setting dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil setting daerah perkotaan dan pedesaan. Sasaran dan objek penelitian keluarga miskin yang teresgister dan keluarga miskin yang tidak teresgister layanan program pemerintah. Berdasarkan hal tersebut ditentukan 600 keluarga miskin di wilayah pedesaan dan 600 di wilayah perkotaan. Objek penelitian adalah kondisi keluarga miskin yang ada di pedesaan dan perkotaan. Teknik pengumpulan data digunakan kuesioner dan observasi. Data penelitian diolah secara manual dan komputasi dengan menggunakan bantuan program Excel dan program statistik SPSS versi 17.00 for windows. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan kemudian diberi makna (interpretatif). Hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan dan persamaan kondisi kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Persamaan antara lain: keluarga miskin mempunyai jumlah anggota rata-rata 3-4 orang, frekuensi makan dua kali sehari, tidak mempunyai pekerjaan sampingan, tidak mempunyai ketrampilan, pekerjaan ada di sektor informal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membelanjakan uang untuk kebutuhan dasar, kurang adanya budaya menabung dan kurang mendapat kesempatan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan, terbatasnya aksesibilitas layanan sosial, terbatasnya kepemilikan aset. Perbedaan antara lain: pedesaan

berpendidikan sebagian besar SD, pekerjaan buruh tetap/tidak tetap pertanian, kepemilikan rumah milik sendiri, ada pembagian ruangan sesuai fungsinya, dan bahan bakar utama kayu, sedangkan perkotaan bervariasi dari SD, SMP dan SMA; buruh tetap/tidak tetap non pertanian, kepemilikan rumah sewa/kontrak, tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing ruangan, dan bahan bakar utama gas/listrik serta perbedaan partisipasi sosial desa lebih tinggi keterlibatannya daripada perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan, perlunya instrumen indikator kemiskinan yang tepat dalam rangka mengidentifikasi keluarga miskin, sehingga ada ketepatan sasaran dalam program-program yang akan diterapkan, agar keluarga miskin dapat cepat terentaskan.

**Kata Kunci: Kemiskinan, Perkotaan, Perdesaan.**

## **A. PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan dapat muncul dalam berbagai dimensi, karena dampak dari bencana alam, keterpencilan suatu wilayah, ketergantungan, keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Kemiskinan dibedakan dua yaitu: (1) kemiskinan sebagai suatu gejala ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar penduduk miskin yang berhubungan dengan kekurangan pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak (2) kemiskinan budaya lebih banyak terletak dalam diri manusia itu sendiri seperti cara hidup, tingkahlaku dan gejala sosial lainnya. Masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan, keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini, program-program yang dilakukan pemerintah masih belum dapat menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan masih merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia, meskipun berbagai upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, namun jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, beberapa tahun terbitan (dalam Istiana Hermawati, dkk, 2015)), menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2013 (per September) ada 11,46 juta orang, tahun 2014 (per September) ada 10,96 juta orang dan tahun 2015 (per Maret) ada 11,22 juta orang. Data tersebut dapat dimaknai bahwa angka kemiskinan penduduk Indonesia relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2015

terlihat ada peningkatan 10,96 juta orang menjadi 11,22 juta orang. Kenaikan tersebut diduga karena banyak faktor seperti kenaikan BBM, inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta naiknya beberapa bahan kebutuhan pokok yang dirasakan sangat membebani warga masyarakat.

Kemiskinan merupakan persoalan multi-dimensional yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik, menurut Nugraha (1995), faktor-faktor tersebut diperjelas, pertama; kemiskinan berdimensi ekonomi atau material, yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya, dapat diilustrasikan yaitu lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin ada kecenderungan akan membentuk budaya kemiskinan seperti nrimo, apatis, epstetik, fatalistik, dan ketidakberdayaan. Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya mengalami kemiskinan struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Menurut Freidman (dalam Suharto, dkk, 2004), memberikan pengertian kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal yang produktif atau aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lain-lain); sumber keuangan (pendapatan dan kredit); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan (partai, politik, koperasi); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan

kehidupan orang. Lebih lanjut Suharto, dkk (2004) juga mendefinisikan kemiskinan baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan dalam arti luas ditandai dengan kekurangan pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Negara dan pemerintah Indonesia mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dimaksud sebagaimana definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditandai dengan terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Midgley (dalam Huda, 2009), kebutuhan material, spiritual dan sosial merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas, aksesibilitas dan produktivitas setiap orang, baik secara individu maupun kelompok. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi, apabila tidak maka akan mempengaruhi aktivitas, aksesibilitas dan produktivitas dan lebih lanjut akan mempengaruhi taraf kesejahteraan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, kebutuhan pada setiap orang bersifat mutlak untuk dipenuhi.

Hampir semua kajian masalah kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi (*the modernisation paradigm*) dan *the product centered model* kajiannya didasari teori pertumbuhan ekonomi kapital dan ekonomi *neoclassicortodox* (Suharto, 2005). Secara umum, pendekatan yang dipergunakan lebih terkonsentrasi pada *individual poverty* sehingga aspek *structural and social poverty* menjadi kurang terjamah. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak, yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Bappenasdi tahun 2004 mengungkap, bahwa program penanggulangan kemiskinan cenderung berorientasi pada

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial, sementara program yang berbasis perluasan kesempatan kerja, pembinaan usaha masih minim (Istiana Hermawati, dkk, 2015), hal ini menunjukkan belum efektif sebagian besar program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan oleh pemerintah. Kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan ditengarai disebabkan kriteria kemiskinan di berbagai daerah mempunyai aturan sendiri-sendiri, sehingga terjadilah banyak keluarga miskin yang tidak dapat mengakses berbagai program layanan pemerintah karena mereka tidak terdaftar sebagai keluarga miskin atau dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kementerian Sosial RI sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia perlu merumuskan konsep dan indikator kemiskinan yang komprehensif dengan indikator yang jelas dan terukur melalui metode penelitian yang handal, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta tahun 2015, melakukan penelitian tentang Kajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di 34 Provinsi (Istiana Hermawati, dkk, 2015), dan hasilnya menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang telah teruji valid dan handal (reliabel), sehingga dapat merumuskan indikator kemiskinan yang komprehensif dan terukur. Konsep indikator kemiskinan tersebut perlu di implementasikan kepada sasaran yaitu keluarga miskin baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang Kondisi Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan dilakukan. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan?. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah diketahui kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan. Adapun manfaat hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka mengidentifikasi keluarga miskin, sehingga ada ketepatan sasaran dalam program-program yang akan diterapkan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan kondisi kemiskinan yang terjadi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara *community setting* dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil *setting* daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai *setting* penelitian, dengan mengambil 1 (satu) sampel kabupaten yakni kabupaten Tasikmalaya sebagai representasi wilayah pedesaan dan 1 (satu) sampel kota, yakni Bandung sebagai representasi wilayah perkotaan. Masing-masing kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik di atas untuk Kabupaten Tasikmalaya ditentukan lima kecamatan, yakni: Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Manonjaya, dan Kecamatan Sodonghilir. Sedangkan untuk Kota Bandung yakni Kecamatan Coblong, Kecamatan Andir, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Cisendo.

### Sasaran dan Objek Penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang teresgister (penerima layanan program pemerintah) dan keluarga miskin yang tidak teresgister layanan program pemerintah. Berdasarkan teknik *Multi Stage Cluster Random Sampling*, maka ditentukan satu (1) kota dan satu (1) kabupaten dan setiap kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan sebagai sampel penelitian. Setiap kecamatan dilibatkan enam petugas pengumpul data (terdiri dari pendamping PKH/Kube, TKSK, PSM, atau pendamping program layanan dari pemerintah lainnya) dan masing-masing petugas pengumpul data tersebut mendata 20 keluarga miskin, maka secara keseluruhan subyek penelitian per wilayah pedesaan adalah 600 keluarga miskin (6 orang petugas pengumpul data x 5 kecamatan x 20 keluarga miskin), demikian juga untuk wilayah perkotaan ada 600 keluarga miskin. Objek penelitian adalah kondisi keluarga miskin yang ada di pedesaan dan perkotaan.

### Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data digunakan dengan angket/quesioner dengan alasan untuk memperoleh data obyektif kondisi keluarga miskin, dari subjek atau informan penelitian. Teknik observasi digunakan untuk melengkapi data yang belum dapat terungkap dalam wawancara. Menurut Djemari Mardapi (Istiana, Hermawati, dkk, 2015), suatu instrumen, baik tes maupun non tes harus memiliki bukti kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas), agar instrumen mempunyai tingkat ketepatan dan kecermatan alat ukur/ instrumen dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur serta mampu mengungkapkan data yang tepat. Reliabilitas instrumen atau keterandalan instrumen akan dilihat melalui nilai koefisien *alpha Cronbach*, dengan cara bila koefisien gabungan butir (Reliable Alpha) adalah 0,70 atau lebih, maka instrumen dinyatakan handal (Kerlinger dalam Istiana Hermawati, dkk, 2015).

Instrumen yang akan dipakai dalam penelitian ini telah dilakukan *try out* oleh Istiana Hermawati, dkk (2015) di 34 provinsi. Dari pengujian validitas dan reliabilitas butir-butir pertanyaan dalam instrumen (53 butir pertanyaan), terbukti hanya 45 butir yang memiliki nilai  $r > r_{hitung}$ . Kesimpulannya ada delapan butir pertanyaan yang digugurkan dari instrumen. Setelah delapan butir digugurkan, maka dilakukan pengujian diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,938, hasil tersebut dapat disimpulkan ke 45 butir tersebut telah valid dan reliabel. Berdasarkan instrumen ini, maka penelitian ini menggunakan instrumen yang sudah valid dan reliabel.

### Teknik Analisis Data.

Data yang terkumpul dalam penelitian bersifat kuantitatif dan untuk menggambarkan deskripsi sasaran/persebaran data penelitian yaitu penjumlahan data yang diperoleh, dan untuk memudahkan perhitungan penjumlahannya, maka diolah secara manual dan komputasi dengan menggunakan bantuan program Excel dan program statistik SPSS versi 17.00 for windows. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan kemudian akan diberi makna (interpretatif), dengan cara mereduksi data sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dideskripsikan dan diberi interpretasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah **diketahui kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan** yang akan di lihat dari (1) identitas keluarga miskin (2) keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS dalam keluarga miskin(3) kondisi perekonomian keluarga miskin (4) kondisi perumahan/tempat tinggal keluarga miskin (5) kepemilikan aset keluarga miskin (6) aksesibilitas keluarga miskin terhadap program layanan sosial (7) persepsi keluarga miskin tentang kemiskinan ditinjau dari aspek (a) ekonomi (b) sosial (c) psikis (4) budaya dan (5) politik.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian, menemukan kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: (1) Identitas keluarga miskin (a) Untuk wilayah pedesaan, antara lain:kepemilikan jumlah anggota keluarga yang mempunyai 3-4 orang (terbanyak ada 258 orang atau 43 persen); kepemilikan tingkat pendidikan yang terbanyak kurang atau sama dengan SD/sederajat (ada 458 orang atau 76,33 persen); status pekerjaan utama seminggu terakhir paling banyak buruh tidak tetap pertanian ada 196 orang (32,67 persen); buruh tidak tetap non pertanian ada 133 orang (22,17 persen); tidak bekerja ada 90 orang (15 persen); status pekerjaan sampingan sebagian besar tidak ada (443 orang atau 78,83 persen); kepemilikan keterampilan tidak punya ada 413 orang atau 68,67 persen. (b) Wilayah perkotaan kepemilikan jumlah anggota keluarga yang mempunyai 3-4 orang (ada 270 orang atau 45 persen); kepemilikan tingkat pendidikan bervariasi yaitu SD, ada 218 orang (36,33 persen), SMP, ada 128 orang (21,33 persen) dan SMA, ada 160 orang (26,66 persen); status pekerjaan utama seminggu terakhir paling banyak buruh tidak tetap pertanian ada 122 orang (20,33 persen); buruh tidak tetap non pertanian ada 88 orang (14,67 persen); tidak bekerja ada 124 orang (20,67 persen); status pekerjaan sampingan sebagian besar tidak ada (423 orang atau 70,50 persen); kepemilikan keterampilan tidak punya ada 499 orang atau 83,17 persen.

(2) Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS dalam keluarga miskin (a) Untuk wilayah pedesaan seperti, lanjut

usia terlantar ada 206 orang (34,33 persen); wanita usia 18-59 tahun menjadi orangtua tunggal dengan anak yang masih dalam tanggungan ada 51 orang (8,50 persen); anak usia 5-17 tahun yang tidak mendapat makanan sehat ada 33 orang (4,44 persen); anak balita 0-4 tahun tidak dapat imunisasi ada 10 orang (8,06 persen); anggota keluarga yang cacat ada 90 orang (15 persen) dan penyakit kronis ada 70 orang (11,67 persen). (b) Untuk wilayah perkotaan seperti, lanjut usia terlantar ada 59 orang (14,94 persen); wanita usia 18-59 tahun menjadi orangtua tunggal dengan anak yang masih dalam tanggungan ada 94 orang (15,67 persen); anak usia 5-17 tahun yang tidak mendapat makanan sehat ada 68 orang (10,19 persen); tidak mendapatkan pendidikan formal 9 tahun ada 94 orang (14,09); anak balita 0-4 tahun tidak dapat imunisasi ada 3 orang (2,97 persen); tidak mendapat ASI ada 7 orang (6,93 persen); tidak memperoleh makanan sehat ada 9 orang (8,91 persen), anggota keluarga yang cacat ada 60 orang (10 persen) dan penyakit kronis ada 15 orang (15 persen).

(3) Kondisi perekonomian keluarga miskin (a) Untuk wilayah pedesaan seperti, sumber penghasilan dari kepala keluarga ada 343 orang (57,17 persen); sumber penghasilan lain dari suami/istri ada 388 orang (64,67 persen); sumber penghasilan dari anak ada 127 orang (21,17 persen); sumber penghasilan dari anggota keluarga lain yang serumah ada 27 orang (4,5 persen); jumlah penghasilan pokok seminggu terakhir <750 ribu ada 352 orang (58,67 persen); memiliki penghasilan dari aset seminggu terakhir <750 ribu ada 30 orang (5 persen); mempunyai penghasilan dalam sebulan <600 ribu ada 273 orang (45,50 persen) dan jumlah pengeluaran perbulan <1,8 juta ada 454 orang (75,67 persen). (b) Untuk wilayah perkotaan seperti, sumber penghasilan dari kepala keluarga ada 367 orang (61,17 persen); sumber penghasilan lain dari suami/istri ada 190 orang (31,67 persen); sumber penghasilan dari anak ada 143 orang (23,83 persen); sumber penghasilan dari anggota keluarga lain yang serumah ada 39 orang (6,5 persen); jumlah penghasilan pokok seminggu terakhir <750 ribu ada 391 orang (66,67 persen); memiliki penghasilan dari aset seminggu terakhir <750 ribu ada 83 orang (13,83 persen);

mempunyai penghasilan dalam sebulan <600 ribu ada 272 orang (45,33 persen) dan jumlah pengeluaran perbulan <1,8 juta ada 590 orang (99,33 persen).

(4) Kondisi perumahan/tempat tinggal keluarga miskin: (a) Wilayah pedesaan seperti, kepemilikan rumah sendiri ada 502 orang (83,67 persen); status tanah milik sendiri yang ditempati ada 252 orang (42 persen); luas lahan yang ditempati >38 m<sup>2</sup> ada 489 orang (81,5 persen); jenis lantai semen/papan /kayu berkualitas rendah ada 460 orang (76,67 persen); jenis atap bangunan yang terluas dari bambu ada 497 orang (82,83 persen), jenis dinding terluas dari beton ada 318 orang (53 persen); sumber penerangan PLN ada 536 orang (89,33 persen); sumber air sumur ada 436 orang (72,67 persen); sumber air minum dr sumur ada 381 orang (63,50 persen); bahan bakar utama kayu ada 389 orang (64,83 persen); dan fasilitas MCK (umum) ada 274 orang (45,67 persen). (b) Wilayah perkotaan seperti kepemilikan rumah sendiri ada 248 orang (41,33 persen); status tanah milik sendiri yang ditempati ada 156 orang (26 persen); luas lahan yang ditempati >38 m<sup>2</sup> ada 516 orang (86 persen); jenis lantai semen/papan /kayu berkualitas rendah ada 302 orang (50,33 persen); jenis atap bangunan yang terluas dari bambu ada 310 orang (51,67 persen); jenis dinding terluas dari tembok ada 325 orang (54,17 persen); sumber penerangan PLN ada 515 orang (85,83 persen); sumber air sumur ada 417 orang (69,50 persen); sumber air minum dr sumur ada 222 orang (37 persen); bahan bakar utama listrik/gas ada 549 orang (91,50 persen) dan fasilitas MCK (bersama) ada 228 orang (38 persen).

(5) Kepemilikan aset: (a) Wilayah pedesaan, seperti tanah ada 224 orang (37,33 persen); perhiasan ada 40 orang (6,67 persen); tabungan ada 101 orang (16,33 persen); ternak ada 114 orang (19 persen); perahu motor ada 4 orang (0,67 persen); sepeda motor ada 112 orang (18,67 persen); tempat usaha ada 37 orang (6,67 persen); sepeda ada 77 orang (12,83 persen); perahu sampan ada 1 orang (0,17 persen); lemari es ada 22 orang (3,67 persen); mesin cuci ada 6 orang /1 persen, televisi >21 in ada 146 orang (24,33 persen) dan HP ada 279 orang (46,50

persen). (b) Wilayah perkotaan seperti tanah ada 7 orang (1,17 persen); perhiasan ada 19 orang (3,17 persen); tabungan ada 15 orang (2,5 persen); ternak ada 1 orang (0,17 persen); perahu motor ada 4 orang (0,67 persen); sepeda motor ada 132 orang (22 persen); tempat usaha ada 37 orang (6,17 persen); sepeda ada 44 orang (7,33 persen); perahu sampan ada 1 orang (0,17 persen); lemari es ada 132 orang (22 persen); mesin cuci ada 26 orang (4,33 persen); televisi >21 in ada 267 orang (44,50 persen) dan HP ada 459 orang (76,50 persen).

(6) Aksesibilitas keluarga miskin terhadap program layanan sosial: (a) Wilayah pedesaan seperti, program Indonesia Pintar ada 386 orang (51,19 persen); program Indonesia sehat/ jamkesmas/jaskesda ada 1642 orang (87,62 persen); program keluarga sejahtera ada 1121 orang (83,97 persen); raskin ada 1590 orang (94,59 persen); BPJS ketenagakerjaan/jamsostek ada 6 orang (1,01 persen); asuransi lanjut usia terlantar ada 7 orang (1,17 persen); asistensi sosial orang dengan kecacatan (ASODK) ada 8 orang (1,33 persen); Program kesejahteraan sosial anak /PKSA ada 151 orang (22,47 persen), Program keluarga harapan/PKH ada 1564 orang (82,53 persen) dan kelompok usaha bersama/ KUBE ada 25 orang (4,17 persen). (b) Wilayah perkotaan seperti, Program Indonesia Pintar ada 230 orang (38,33 persen), program Indonesia Sehat/jamkesmas/jaskesda ada 1337 orang (92,65 persen); program keluarga sejahtera ada 464 orang (77,33 persen); raskin ada 566 orang (94,33 persen); BPJS ketenagakerjaan/jamsostek ada 39 orang (12,34 persen); asuransi lanjut usia terlantar ada 6 orang (1,99 persen); asistensi sosial orang dengan kecacatan (ASODK) ada 4 orang (1,44 persen); Program Kesejahteraan Sosial Anak /PKSA tidak ada, Program keluarga Harapan/PKH ada 151 orang (38,52 persen) dan kelompok usaha bersama/KUBE tidak ada.

(7) Persepsi keluarga miskin tentang kemiskinan ditinjau dari (a) aspek ekonomi (a.1) Wilayah pedesaan, seperti: Keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan makanan minimal 2 kali sehari ada 592 orang (98,67 %); Keluarga dapat mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal seminggu sekali ada 461 orang (78,83 persen);

Keluarga mampu membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali ada 410 orang (68,33%); Keluarga memiliki tempat tinggal dengan pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing seperti kamar, tidur, dapur dll, ada 444 orang (74 persen); Keluarga menggunakan listrik (PLN atau non PLN) sebagai alat penerangan utama ada 580 orang (96,67 persen); Keluarga menggunakan sumber air minum dari sumur/ledeng/ PDAM/ kemasan, ada 434 orang (72,33 persen); Keluarga memiliki jamban/WC untuk keperluan MCK, ada 209 orang (34,83 persen); Kepala Keluarga dapat menyelesaikan pendidikan minimal sampai jenjang SMP/ sederajat, ada 131 orang (21,83 persen); Bila terdapat anggota keluarga yang sakit dapat berobat ke fasilitas kesehatan, ada 536 orang (89,33 persen); Terdapat anggota keluarga memiliki penyakit kronis/menahun, ada 141 orang (23,50 persen); Kepala keluarga memiliki pekerjaan yang tetap baik dari sektor formal maupun non formal selama 3 bulan terakhir, ada 211 orang (35,17 persen) dan Kepala keluarga memiliki penghasilan Rp 600 ribu perbulan, ada 324 orang (54 persen).

(a.2) Wilayah perkotaan, antara lain: Keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan makanan minimal 2 kali sehari, ada 574 orang (95,67 persen); Keluarga dapat mengkonsumsi daging/ ikan/telur minimal seminggu sekali, ada 526 orang (87,67 persen); Keluarga mampu membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali, ada 471 orang (78,50 persen); Keluarga memiliki tempat tinggal dengan tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing seperti kamar, tidur, dapur dll, ada 348 orang atau 58 persen); Keluarga menggunakan listrik (PLN atau non PLN) sebagai alat penerangan utama, ada 595 orang (99,17 persen); Keluarga menggunakan sumber air minum dari sumur/ ledeng/ PDAM/ kemasan, ada 569 orang (94,83 persen); Keluarga memiliki jamban/WC untuk keperluan MCK, ada 406 orang (67,67 persen); Kepala Keluarga dapat menyelesaikan pendidikan minimal sampai jenjang SMP/ sederajat, ada 360 orang (60 persen); Bila terdapat anggota keluarga yang sakit dapat berobat ke fasilitas kesehatan, ada 571 orang (95,17 persen); Terdapat anggota

keluarga memiliki penyakit kronis/menahun, ada 172 orang (28,67 persen); Kepala keluarga memiliki pekerjaan yang tetap baik dari sektor formal maupun non formal selama 3 bulan terakhir, ada 327 orang (54,50 persen) dan Kepala keluarga memiliki penghasilan Rp 600 ribu perbulan, ada 375 orang (62,50 persen).

(b) Aspek sosial dilihat dalam (b.1) Wilayah pedesaan mempunyai karakteristik antara lain: Keluarga miskin Keluarga terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, seperti pertemuan RT, gotong royong, ronda dsbnya, ada 529 orang (88,17 persen); Keluarga biasa berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga, ada 543 orang (90,50 persen); Keluarga miskin melibatkan anggota keluarga dalam mengambil keputusan, ada 469 orang (78,17 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam pengumpulan dana sosial di masyarakat seperti jimpitan, uang duka, iuran dll, ada 511 orang (85,17 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan di lingkungannya, seperti pemberian zakat, sedekah, infaq dll, ada 461 orang (76,83 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar, ada 561 orang (93,50 persen); Keluarga miskin berpartisipasi menjenguk orang sakit atau melayat di lingkungannya, ada 579 orang (96,50 persen); Keluarga miskin saling menjaga silaturahmi dengan kerabat suami atau istri, ada 562 orang (93,67 persen); Keluarga miskin mudah memanfaatkan fasilitas kesehatan, ada 502 orang (83,67 persen); Keluarga miskin mudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, ada 464 orang (77,33 persen) dan Keluarga miskin mudah memperoleh fasilitas sumber air bersih, ledeng, atau PAM, ada 304 orang (50,67 persen); Keluarga miskin mudah dalam memperoleh layanan pemerintah seperti dalam mengurus akta kelahiran, KTP dsbnya, ada 514 orang (85,67 persen).

(b.2) Wilayah perkotaan, mempunyai karakteristik antara lain: Keluarga miskin terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, seperti pertemuan RT, gotong royong, ronda dsbnya, ada 452 orang (75,33 persen); Keluarga biasa berkomunikasi dengan

seluruh anggota keluarga, ada 571 orang (95,17 persen); Keluarga miskin melibatkan anggota keluarga dalam mengambil keputusan, ada 504 orang (84 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam pengumpulan dana sosial di masyarakat seperti jimpitan, uang duka, iuran dll, ada 460 orang (76,67 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan di lingkungannya, seperti pemberian zakat, sedekah, infaq dll, ada 498 orang (83 persen); Keluarga miskin berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar, ada orang 504 orang (84 persen); Keluarga miskin berpartisipasi menjenguk orang sakit atau melayat di lingkungannya, ada 557 orang (92,83 persen); Keluarga miskin saling menjaga silaturahmi dengan kerabat suami atau istri, ada 560 orang (93,33 persen); Keluarga miskin mudah memanfaatkan fasilitas kesehatan, ada 567 orang (94,50 persen); Keluarga miskin mudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, ada 495 orang (82,50 persen) dan Keluarga miskin mudah memperoleh fasilitas sumber air bersih, ledeng, atau PAM, ada 550 orang (91,67 persen); Keluarga miskin mudah dalam memperoleh layanan pemerintah seperti dalam mengurus akta kelahiran, KTP dsbnya, ada 583 orang (97,17 persen).

(c) Aspek psikis, (c.1) Wilayah pedesaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin merasa dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, ada 594 orang (99 persen); Keluarga miskin merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat (525 orang /87,50 persen); Keluarga miskin merasa aman dari ketakutan kehilangan mata pencaharian, ada 351 orang (58,50 persen); Keluarga miskin merasa yakin dapat mengatasi masalah yang dihadapi keluarga, ada 492 orang (82 persen); Keluarga miskin merasa yakin dapat memperbaiki taraf hidup yang layak, ada 483 orang (83,50 persen); Keluarga miskin merasa nyaman hidup dalam lingkungan alam yang bersih dan sehat, ada 529 orang (88,17 persen); Keluarga miskin merasa bebas menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat, ada 460 orang (76,67 persen); Keluarga miskin merasa mudah dalam memperoleh bantuan dari teman, keluarga atau kerabat, ada 477 orang (79,50 persen).

(c.2) Wilayah perkotaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin merasa dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut ada 589 orang (98,17 persen); Keluarga miskin merasa memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat ada 581 orang /96,83 persen); Keluarga miskin merasa aman dari ketakutan kehilangan mata pencaharian ada 359 orang (59,83 persen); Keluarga miskin merasa yakin dapat mengatasi masalah yang dihadapi keluarga ada 565 orang (94,17 persen); Keluarga miskin merasa yakin dapat memperbaiki taraf hidup yang layak ada 545 orang (90,80 persen); Keluarga miskin merasa nyaman hidup dalam lingkungan alam yang bersih dan sehat ada 550 orang (91,67 persen); Keluarga miskin merasa bebas menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat ada 543 orang (90,50 persen); Keluarga miskin merasa mudah dalam memperoleh bantuan dari teman, keluarga atau kerabat ada 534 orang (89 persen).

(d) Aspek budaya, (d.1) Wilayah pedesaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk bekerja selama lebih dari 40 jam/minggu, ada 397 orang (66,17 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama 40 jam/minggu, ada 412 orang (68,67 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan membelanjakan uang untuk kebutuhan yang paling mendasar, ada 521 orang (86,83 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk menabung (240 orang/40 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk merencanakan kebutuhan keluarga, ada 448 orang (74,67 persen); Keluarga miskin memiliki semangat untuk lebih baik, ada 548 orang (91,33 persen); Keluarga miskin memiliki sikap mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari tetangga, kerabat atau pihak lain, ada 461 orang (76,83 persen); Keluarga miskin terbebas dari kebiasaan meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang besar meskipun dalam kondisi mendesak, ada 360 orang (60 persen).

(d.2) Wilayah perkotaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk bekerja selama lebih dari 40 jam/minggu ada 410 orang (68,33 persen);

Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama 40 jam/minggu ada 425 orang (70,83 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan membelanjakan uang untuk kebutuhan yang paling mendasar ada 591 orang (98,50 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk menabung, ada 100 orang (16,67 persen); Keluarga miskin memiliki kebiasaan untuk merencanakan kebutuhan keluarga, ada 407 orang (67,83 persen); Keluarga miskin memiliki semangat untuk lebih baik, ada 585 orang (97,50 persen); Keluarga miskin memiliki sikap mandiri dan tidak tergantung pada bantuan dari tetangga, kerabat atau pihak lain ada 518 orang (86,33 persen); Keluarga miskin terbebas dari kebiasaan meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang besar meskipun dalam kondisi mendesak ada 473 orang (78,83 persen).

(e) Aspek politik (e.1) Wilayah pedesaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat seperti pembuatan jembatan, jalan, pembuatan MCK dll, ada 290 orang (48,33 persen); Keluarga miskin dapat menyampaikan aspirasi/gagasan melalui organisasi sosial atau organisasi pemerintahan yang ada di masyarakat ada 297 orang (49,50 persen); Keluarga miskin dapat memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di lingkungannya ada 383 orang (63,83 persen); Keluarga miskin terlibat dalam penentuan keluarga miskin yang akan mendapatkan program bantuan dari pemerintah ada 129 orang (21,50 persen).

(e.2) Wilayah perkotaan, mempunyai karaktersistik antara lain: Keluarga miskin terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat seperti pembuatan jembatan, jalan, pembuatan MCK dll, ada 307 orang (51,17 persen); Keluarga miskin dapat menyampaikan aspirasi/gagasan melalui organisasi sosial atau organisasi pemerintahan yang ada di masyarakat ada 328 orang (54,67 persen); Keluarga miskin dapat memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di lingkungannya ada 372 orang (62 persen); Keluarga miskin terlibat dalam penentuan keluarga miskin yang akan mendapatkan program bantuan dari pemerintah ada 189 orang (31,50 persen).

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan temuan diatas, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dan persamaan kondisi kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Persamaan antara lain: mempunyai jumlah anggota rata-rata 3-4 orang, frekuensi makan dua kali sehari, tidak mempunyai pekerjaan sampingan, tidak mempunyai ketrampilan, pekerjaan ada di sektor informal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membelanjakan uang untuk kebutuhan yang mendasar, kurang adanya budaya menabung dan kurang mendapat kesempatan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan serta aksesibilitas terhadap layanan sosial masih kurang/terbatas, terbatasnya kepemilikan aset, ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dimana pengeluaran lebih banyak dan mempunyai keuletan dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Sedangkan perbedaan antara lain: pedesaan seperti pendidikan sebagian besar SD, pekerjaan buruh tetap/tidak tetap pertanian, kepemilikan rumah milik sendiri, ada pembagian ruangan sesuai fungsinya, dan bahan bakar utama kayu. Sedangkan perkotaan bervariasi dari SD, SMP dan SMA; buruh tetap/tidak tetap non pertanian, kepemilikan rumah sewa/kontrak, tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing ruangan, dan bahan bakar utama gas/listrik. Partisipasi keluarga miskin dalam kegiatan sosial di pedesaan cukup baik, sedangkan di perkotaan terbatas.

Rekomendasi, kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan bahwa program penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan antara lain: 1) Tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri, artinya melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek, yang didasarkan pada pemahaman suara rakyat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. 2) Pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang

bermartabat.3) Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 4) Langkah-langkah tersebut diupayakan untuk melakukan penajaman di beberapa aspek yang meliputi: penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, pengawasan dan evaluasi dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. 5) Perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

## PUSTAKA ACUAN

- Adiyoga, IDBM dan E. Hermiati. 2003. *Pola Nafkah Lokal: Acuan Pengkajian Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Kasus Provinsi NTT)*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun 1 no. 12 Februari 2003. Jakarta.
- Agus Sjaafari. 2014. *Kemiskinan dalam Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amalia Renggapratiwi. 2009. *Kemiskinan dan Perkembangan Kota Semarang Karakteristik dan Respon Kebijakan*. Semarang: Program Pasca Sarjana UNDIP Diponegoro.
- Baharoglu, Deniz and Christine Kessides. 2001. *Urban Poverty, in World Bank, PRSP Sourcebook World Bank*. Washington DC.
- Bambang Rustanto. 2006. *Kemiskinan Desa dan Kota*. [http://bambang\\_rustanto.blogspot.co.id](http://bambang_rustanto.blogspot.co.id).
- Bappenas. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa- Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chilma Alawiyah.2015. *Analisis Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Punggung serta Solusinya*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Dar,D.W. and C. Bantilan.2005. *Asian Dryland Agriculture: Ideas, Paradigms and Policies Three Decades After*. 10-11 November 2005, Oriental Hotel, Makati Philipines Scarca, Los Banos, The Philipines.
- Daud Bahransyaf,dkk. 2011. *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*. Yogyakarta: Idea Press.
- Edi, Suharto,dkk. 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial : Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- . 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- . 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Mengganggu Model Jaminan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Tajudin Noor. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Elisabetyas.2008. *Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*. Jakarta.
- Febriana, Enny. 2010. *Strategi untuk Menanggulangi Kemiskinan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Istiana Hermawati,dkk. 2015. *Pengkajian Konsep dan Indonesia Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Locabana,Miguel dan Cecilia Cariola.2003. *Globalization and Metropolitan Expansion: Residential Strategies and Livehoods in Caracas and its Periphery,Environment and Urbanization*. <http://eausagepub.com>.
- Manik, W.W, dkk. 1995. *Penelitian Evaluatif tentang Pelaksanaan PBS dalam Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Mubyarto.1991. *Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- . 2002. *Penanggulangan Kemiskinan di Jateng dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun 1 No. 7, November 2002. Jakarta.
- M.C. Gee. 1995. *Metrofitting the Emerging Mega-Urban Regions of ASEAN*. Van Couver: UBC. Press. P1-26.
- M.C. Gel T.G. 1971. *The Urbanization Process in the Third*. Bells and Sons Ltd.
- M.C. Kay, Andrew dan Abbi, M. Kedir. 2005. *Chronic Poverty in Urban Ethiopia*. Panel Data Evidence dan Jurnal Internasional Planning Studies, Vol 10. No. 1. 49-67.
- Muhtartayib.2013. *Kajian Ilmu sosial: Penyebab Kemiskinan Masyarakat di Pedesaan*. <http://muhtartayib.blogspot.co.id>.

- Munandar,S. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Eresco.
- Nugroho, Iwan dan Rokhman Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Peter, Hagul. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Sari,Ernayunita.2000. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Provinsi Jateng*. Bogor: Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Shalimow.2004. *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat melalui P2KB*. <http://shalimow.com/pemberdayaans-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html>.diakses 24-08-2016.
- Simatupang,S. 2008. *Menyempurnakan Provinsi Tapanuli melalui Dukungan Nyata dari KabupatenDairidanFak-FakBharat*.[http://www.silaban.net/2006/04/20/menyempurnakan-provinsi-tapanuli-dukungan-nayta dari kabupaten Dairi dan Fak-Fak Bharat](http://www.silaban.net/2006/04/20/menyempurnakan-provinsi-tapanuli-dukungan-nayta-dari-kabupaten-Dairi-dan-Fak-Fak-Bharat).
- Siti Anisah.2012. *Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Desa*. <http://www.sapa.or.id>.
- Sudaryanto,T dan I.W. Rusastra.2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dalam Pengentasan Kemiskinan*. Seminar Internasional Multi Fungsi Pertanian 27-28 Juni 2006. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Alam Pertanian.
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

